



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
SUB UNIT KERJA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PURWANTO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 429487

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.715.000.000

1. Tanah Seluas 3570 m2 di JOMBANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 892.500.000
2. Tanah Seluas 1290 m2 di JOMBANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 322.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/104 m2 di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 255.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI KUDA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.500.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. 59.900.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 177.778.959**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.212.178.959**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.212.178.959**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyalenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyalenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyalenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyalenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini dimumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal 21 Agustus 2019.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

